

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 MENGENAI
STANDAR AKUNTANSI BASIS AKRUAL**

Oleh:
Indra Franselski Sampel¹
Lintje Kalangi²
Treesje Runtu³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹indraelski@gmail.com
²lintje_kalangi@yahoo.com
³truntu@gmail.com

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang disajikan dalam PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Manado dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pimpinan dan pegawai dari bagian Akuntansi. Analisis Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sebaiknya perlu diadakan kembali sosialisasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat kepada SKPD terkait.

Kata kunci: standar akuntansi, basis akrual.

ABSTRACT

Government Accounting Standards is principles of accounting that is applied in preparing and reporting financial statements that is written of Governmen Regulation 2010 No.71 about the accrual basic. This research aimed to determine the readiness of the government of Manado in implementing accrual-based government accounting standards. Data were collected by observation and interviews with managers and staff of the Accounting Department. The results were analyzed by the method of data collection using qualitative interpretive approach. The results showed that the readiness of the government of Manado in the implementation of the accrual basis of government accounting standards is a reflection of a formality. This is supported by the government regulations to require all local governments including the government of Manado in implementing accrual-based. The complexity of the financial statements to be a major factor in resistant attitudes of the government's financial manager of Manado in the implementation of accrual-based. Meanwhile, in terms of organizational culture, government of Manado required to implement accrual-based government accounting standards. we recommend that there should be resocialization and technical guidance by central government to related local government offices.

Keywords: accounting standards, accrual basis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya Dalam 5 (lima) tahun.

KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini juga berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Pemerintah Kota Manado Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Manado wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Manado wajib menyusun laporan keuangan yang berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Manado. Pemerintah Kota Manado sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kota Manado harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kota Manado agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Manado dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Fakhrurazi (2010) menyatakan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Basis Akrua

KSAP (2010:3) menyatakan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua

Bastian (2010: 118-119) menyatakan bahwa keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh
2. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima
3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal

Bastian (2010:120) menyatakan beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Teori Budaya Organisasi

Shohib (2010) menyatakan bahwa Budaya organisasi dapat di-*manage* dan dikendalikan. Pandangan ini terpecah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pendapat bahwa perubahan budaya organisasi sangat bergantung kemauan para eksekutif dan pendapat yang mengatakan bahwa perubahan hanya mungkin dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan budaya organisasi.

Penelitian Terdahulu

1. Arliana (2011) dengan judul Implementasi Basis Akrua Pada Akuntansi Sektor Publik sebuah kajian fenomenologi, studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang makassar. bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal. Responden dalam

penelitian sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari pegawai KPKNL Makassar. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai KPKNL Makassar serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai KPKNL Makassar sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada KPKNL Makassar yang sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang implementasi basis akrual yang lebih awal yaitu: integritas, profesionalisme (akuntabilitas dan komitmen), sinergi, pelayanan (ketulusan dan transparansi), serta kesempurnaan.

2. Damanik (2011) dengan judul Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada pemerintah Kota Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.604 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala penerapan SAP mempunyai hubungan yang kuat sebesar 60.4%.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Moleong (2010:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain - lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Newman (1997:62) dalam Erna (2008) menyatakan bahwa pendekatan interpretatif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung mengobservasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu pada Kantor Walikota Kota Manado, yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014.

Sumber Data

Moleong (2010:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan).

Sugiyono (2010:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak

pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

2. *Interview* (wawancara).

Moleong (2010:186) Menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan *key informan* yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas informasi yang disampaikan.

3. Dokumentasi.

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Makassar menuju penerapan akuntansi berbasis akrual.

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010:89) Menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Validitas Temuan

Sugiyono (2010:121) menyatakan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan Ketekunan
2. Triagulasi
3. Menggunakan Bahan Referensi

Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa dilakukan atau tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi. Dengan terlebih dahulu membuat permohonan ijin penelitian ke tempat penelitian.

Langkah-langkah penelitian selanjutnya diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara dan alat perekam untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado. Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dengan teknik analisis dalam Sugiyono (2010:91) untuk dibuat laporan penelitiannya. Peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teori budaya, yaitu secara aktif menginterpretasikan data-data yang terkumpul terkait dengan perubahan budaya mengenai peralihan penggunaan standar akuntansi

pemerintahan dari basis kas menuju akrual ke basis akrual penuh sesuai dengan apa yang didapat oleh peneliti dalam proses penelitiannya. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemerintah Kota Manado

Visi Manado 2015: “Manado Kota Model Ekowisata” (*Manado Model City for Ecotourism.*)

Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu dari segi perjalanannya dapat didefinisikan sebagai “perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat”.

Dapat dipahami bahwa ekowisata adalah *ecological tourism*, yaitu suatu model pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola secara kaidah alam untuk menikmati dan menghargai alam (dan segala bentuk budaya yang menyertainya) yang mendukung konservasi, melibatkan unsur pendidikan dan pemahaman, memiliki dampak yang rendah dan keterlibatan aktif sosio ekonomi masyarakat setempat. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan kata lain ekowisata adalah kegiatan wisata alam plus plus. Adanya unsur plus plus di atas yaitu kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat ditimbulkan oleh : Kekhawatiran akan makin rusaknya lingkungan oleh pembangunan yang bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, Asumsi bahwa pariwisata membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat, Kelestarian lingkungan tidak mungkin dijaga tanpa partisipasi aktif masyarakat setempat, Partisipasi masyarakat lokal akan timbul jika mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi (*'economical benefit'*) dari lingkungan yang lestari, Kehadiran wisatawan ke tempat-tempat yang masih alami itu memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan alternatif dengan menjadi pemandu wisata, porter, membuka homestay, pondok ekowisata (*ecolodge*), warung dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan ekowisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka atau meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal, baik secara materiil, spirituil, kulturil maupun intelektual.

Dalam perspektif pembangunan daerah kota Manado jangka panjang, penetapan visi Manado Kota Model Ekowisata adalah satu dari 5 (lima) tahapan pembangunan daerah yang disepakati melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado 2005-2025. Jika tahap pertama yaitu periode 2005-2010 dengan visi Manado Kota Pariwisata Dunia, ditujukan pada upaya memperkenalkan dan menjadikan Manado sebagai salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia, maka pada tahapan kedua yaitu periode 2010-2015 visi kota Manado diarahkan untuk memperkuat citra kota Manado sebagai kota wisata dunia dengan focus pada meningkatkan primadona pariwisata kota Manado yaitu Taman Nasional Bunaken yang dikelola melalui prinsip-prinsip ekowisata.

Oleh karena ekowisata lebih diarahkan pada kawasan Taman Nasional dalam hal ini Taman Nasional Bunaken, maka berkembangnya berbagai kegiatan perkotaan lainnya termasuk *mass-tourism*, *MICE-tourism* maupun perdagangan dan jasa tetap akan dikembangkan. Misi “Menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan.” (*To make Manado a city of happiness*). Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Secara substansial misi pembangunan jangka menengah tahun 2011-2015 ini merupakan kelanjutan dari misi pembangunan jangka menengah sebelumnya yaitu *Manado kota yang menyenangkan dimana setiap orang dapat mewujudkan potensi dan impiannya*.

Yang dimaksud dengan kota yang menyenangkan adalah tempat dimana orang bermukim ataupun orang tinggal dalam situasi kondisi dimana lingkungan fisiknya asri, hijau dan bersih sementara masyarakatnya hidup dengan berbagai aktivitasnya dalam suasana rukun dan damai, tentram, aman sejahtera lahir bathin serta memiliki pemerintahan yang responsive, akuntabel.

Hasil Penelitian

Aparatur pengelola keuangan pemerintah Kota Manado ketika ditanyakan mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah tahu akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Informan 1 selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Neraca Daerah, di Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado Mengatakan bahwa :

Akuntansi Basis Akrual itu merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan.

Informan 2, selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Akuntansi mengatakan bahwa: Akuntansi basis akrual itu dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Menurut Informan 3 selaku staf bidang akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado Mengatakan bahwa : Basis akrual merupakan pengakuan suatu transaksi keuangan tanpa memperhatikan kas, atau diakui pada saat terjadi transaksi.

Dari pandangan para informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa aparat pengelola keuangan di pemerintah Kota Manado telah mengetahui akuntansi pemerintahan basis akrual itu seperti apa. Pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga diperkuat dengan pemaparan yang diuraikan oleh informan 2 yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. Beliau mengatakan: Sederhana akrualnya kan kita langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui. Pada saat akhir tahun, Ketika kemudian pendapatan tidak mampu dipenuhi berarti itu menjadi piutang. Begitu juga di belanja, sebenarnya itu saja buktinya itu akrual hanya saja jurnalnya yang banyak sekali. Kalau tidak salah empat kali jurnal sampai dengan tahap pelaksanaannya pencairan dananya.

Informan 4 selaku staf akuntansi, mengatakan contohnya yaitu pengakuan retribusi daerah. saat wajib pajak yang akan membayar retribusi IMB, dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Maka saat itulah diakui sebagai pendapatan, meskipun wajib pajak belum menyetor IMB tersebut ke bank. Dalam hal ini, kas daerah sesuai dengan tanggal SKRD. Namun lebih ribet memang pakai PP 71 karena bukan Cuma laporannya tapi karena analisisnya juga beda, di PP 71 banyak buku besarnya seperti perusahaan dagang. Informan 5 selaku staf bidang akuntansi mengatakan bahwa pengakuan retribusi daerah diakui sebagai pendapatan pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bukan saat uang diterima atau retribusi dibayarkan.

Mengenai pelatihan tentang PP No.71 tahun 2010, mereka menjawab pernah dilakukan bahkan diantara mereka ada yang sudah lebih dari dua kali mengikuti pelatihan tersebut. Informan 2 mengungkapkan bahwa saya sudah mengikuti pelatihan ini lebih dari 2 (dua) kali, dan saya cukup mengerti. Hal yang sama juga dituturkan oleh Informan 5, ia mengatakan sudah 2 (dua) kali mengikuti pelatihan terkait hal ini dan beliau cukup memahami PP No.71 Tahun 2010, Mereka juga menambahkan bahwa sudah ada software yang mendukung untuk pembuatan laporan keuangan terkait PP No.71 Tahun 2010 ini, dan mereka sangat mendukung mengenai adanya peraturan ini. Mereka menambahkan, Kita dari tahun 2010 sudah terima di internet baik juga dari Depdagri tentang PP 71 ini yang inti di dalamnya itu akuntansi berbasis akrual. di tahun 2013 kita sudah ada kegiatan untuk persiapan menuju ke PP 71.

Sosialisasi PP No.71 tahun 2010, mereka menuturkan sudah pernah dilakukan oleh pemerintah lebih dari 1 (Satu) kali dan mereka mengatakan sudah ada alokasi SDM yang dipersiapkan khusus untuk pembuatan laporan keuangan berbasis akrual ini. Ketika ditanyakan mengenai basis akuntansi apa yang digunakan saat ini, mereka menjawab untuk laporan keuangan kami menggunakan cash basis menuju akrual. Dan saat ditanyakan

mengenai kelebihan akuntansi basis akrual, Informan 5 menjawab ada 2 kelebihannya yaitu lebih mencerminkan kinerja suatu entitas, angka yang disajikan lebih handal, akurat dan terpercaya. Informan 1, kelebihannya yaitu Memberikan pemahaman yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Informan 4 mengatakan, kelebihannya yaitu Laporan tentang besarnya sumberdaya ekonomi yang didapatkan dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan lebih transparan.

Saat ditanyakan mengenai kendala terhadap penerapan peraturan ini, Informan 2 mengatakan Masih perlu penyesuaian dalam penganggaran, Pegawai harus memahami dalam penyusunan laporan keuangan karena ada ketambahan 3 laporan yaitu laporan perubahan SAL, LO dan laporan perubahan ekuitas. Informan 5 mengatakan, kendalanya yaitu Regulasi di daerah dan Sumberdaya Manusia (SDM). Mereka menambahkan hal yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah terkait adanya peraturan ini antarlain Masih perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, Mengikutsertakan pegawai-pegawai dalam sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh departemen keuangan, Mengharuskan pegawai membaca dan memahami peraturan ini, Melaksanakan Kursus dan pelatihan terkait hal ini. Informan 2 mengungkapkan Ya, dengan alasan karena peraturan ini sudah menjadi keputusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi pembahasan baik oleh BPK, Menkeu, Menhukham, yang tujuannya untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola. Informan 4 mengatakan Harus, selain hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk dilaksanakan, juga memudahkan Pemda untuk mengetahui seberapa besar sumberdaya ekonomi dan beban yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Secara pribadi, karena kebetulan kerja dalam instansi pemerintahan, maka pastinya kita ikuti perubahan yang telah di tetapkan pemerintah. Tidak apa-apa juga selama perubahan itu untuk kebaikan dan selama perubahan itu bagus.

Informan 1, seorang kepala subbidang kebijakan akuntansi dan neraca juga berpendapat bahwa Perubahan dalam pemerintah harus dilaksanakan. Masak tidak dilaksanakan padahal ini sudah ada PP. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang harus dilaksanakan apalagi nanti kalau ada sanksi.

Informan 5 selaku staf bagian akuntansi memberikan penjelasan yang menunjukkan resistensi. Beliau mengatakan Untuk penerapan ke peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebenarnya saya belum mau ikut. Artinya, saya juga belum terlalu pahami itu. Pemahaman saya untuk saat ini hanya sebatas dasarnya. Tapi karena sudah tugas dan menjadi peraturan pemerintah jadi harus dilaksanakan saja.

Pembahasan

Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan pemerintah Kota Manado terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun, Pemerintah Kota Manado telah melakukan persiapan-persiapan yang mengarah ke implementasi basis akrual dengan lebih intens melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada jajaran staf dan pejabat pemerintahan Kota Manado. *Bueraucratic culture* merupakan ciri khas yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado sebagai identitas dari organisasinya karena Pemerintah Kota Manado senantiasa melakukan segala program kerjanya berdasarkan atas keputusan dari pemerintah pusat. Resistensi terhadap kebijakan yang baru memang ada, selain karena aturan lama yang masih butuh pembelajaran dan sering terjadinya perubahan kebijakan juga mendorong perilaku ini. Resistensi tersebut muncul karena adanya kebiasaan yang berubah, yaitu mereka mengubah cara kerja dengan pola yang lama mengikuti ke pola yang baru.

Penelitian terdahulu, dilakukan oleh Arliana (2011), yaitu Implementasi Basis Akrual Pada Sektor Publik pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa secara umum para pegawai telah memahami makna basis akrual, dan dengan adanya sistem aplikasi akuntansi basis akrual membuat para pegawai sangat terbantu dalam melaksanakan tugas. Penelitian yang dilakukan Damanik (2011), yaitu Faktor – Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala SAP mempunyai hubungan yang kuat.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan pemerintah Kota Manado terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menimbulkan berbagai reaksi secara individual oleh aparat pemerintah Kota Manado, baik reaksi positif maupun negatif. Namun, secara budaya organisasi menganut tipe *bureaucratic culture*, di mana prosedur yang kaku dalam menjalankan aktivitas organisasinya pemerintah Kota Manado diwajibkan mengikuti segala ketentuan dan aturan main dalam budaya organisasi tersebut, Dalam hal ini pemerintah Kota Manado memiliki kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Pemerintah Kota Manado melakukan persiapan-persiapan menuju implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Hal ini didukung dengan adanya bukti nyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kota Manado dengan melakukan persiapan menuju ke implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah merupakan perilaku yang berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang mewajibkan kepada semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado untuk menerapkan SAP berbasis akrual.
4. Bentuk persiapan pemerintah Kota Manado seperti sosialisasi kepada aparat pemerintah Kota Manado, merevisi peraturan pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah pemerintah Kota Manado dalam implementasi SAP berbasis akrual di tahun 2015.

Saran

1. Perlu adanya upaya akselerasi sinkronisasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan peraturan lokal di pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kota Manado sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang nantinya akan diterapkan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan demikian, tidak timbul masalah saat penerapan.
3. Diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Manado akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan *training* atau pelatihan berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliana, Gaybi. 2011. Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1313>. diakses pada 13 September 2014. Hal. 10-21.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.

- Damanik, Citra. 2011. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25663>. Diakses pada 13 September 2014. Hal.11-22.
- Erna 2008. Pendekatan Interpretif. *Artikel*. <http://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/>. Diakses pada 5 September 2014.
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. *Artikel*. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses pada 7 September 2014.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.
- KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan). 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta 25 Maret.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Shohib, Muhammad. 2010. *Strategi Perubahan Budaya Organisasi*. <http://ms.shohib.staff.umm.ac.id/>. Diakses tanggal 17 April 2014.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

